

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian seringkali menjadi tolok ukur apakah suatu individu atau kelompok makmur dan sejahtera. Mulai dari tingkat keluarga hingga negara. Jika perekonomian sebuah keluarga bagus tentu akan diikuti dengan keadaan keluarga yang menjadi sejahtera. Begitupun dengan negara, jika perekonomian sebuah negara bagus, maka masyarakatnya juga akan mengalami kesejahteraan. Maka dari itu, kesejahteraan merupakan tujuan akhir dari adanya pembangunan ekonomi. Dengan demikian, terdapat hubungan yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi akan meningkat setelah pembangunan ekonomi berhasil. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa indikator utama yang digunakan dengan tujuan untuk menilai efektivitas pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi (Nugraha et al., 2020).

Menurut (Todaro & Smith, 2012), Pengangguran, ketimpangan, dan kemiskinan semuanya dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Solusi dari kesulitan-kesulitan tersebut terletak pada pencapaian pembangunan ekonomi yang maksimal, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah mengidentifikasi tiga indikator utama pembangunan inklusif di Indonesia, yang disebut sebagai pilar. Pilar pertama berkaitan dengan kemajuan dan perkembangan ekonomi, yang mencakup tiga sub-pilar: prospek lapangan

kerja, ekspansi ekonomi, dan infrastruktur ekonomi. Terdapat tiga sub pilar yang menjadi pilar kedua, yakni mengentaskan kemiskinan dan mencapai pemerataan pendapatan. Hal-hal tersebut adalah kesenjangan, kemampuan manusia, dan kemiskinan. Terakhir, pilar ketiga bertujuan untuk memperluas akses dan kesempatan, yang terdiri dari tiga sub-pilar: inklusi keuangan, infrastruktur ekonomi fundamental, dan kapabilitas manusia (Ernawati et al., 2021).

Infrastruktur berperan penting terhadap kelancaran pembangunan ekonomi. Semua kegiatan ekonomi dapat berjalan lancar jika infrastruktur pendukung memadai. Menurut (Ernawi, 2007) kegiatan ekonomi masyarakat suatu negara tidak dapat berjalan dengan maksimal jika infrastruktur pendukungnya tidak layak. Aksesibilitas infrastruktur sosial (kesehatan dan pendidikan) serta infrastruktur ekonomi (jalan, listrik, air, dan telekomunikasi) sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi.

Menurut (*World Bank*, 2023) Infrastruktur di sebagian besar negara berkembang masih sangat kurang. Sebanyak 1 miliar orang tinggal lebih dari 2 kilometer dari jalan raya sepanjang musim, sebanyak 675 juta tidak memiliki akses listrik di rumah, dan hampir 4 miliar orang hidup tanpa akses internet. Gangguan ini menyebabkan kerugian ratusan miliar dolar per tahun pada rumah tangga dan perusahaan. Kendala infrastruktur yang tidak dapat diandalkan memberikan dampak terhadap kegiatan masyarakat termasuk kegiatan ekonomi. Melihat banyaknya fakta-fakta di lapangan yang menunjukkan kurangnya perhatian terhadap infrastruktur, membuat mata kita terbuka betapa pentingnya infrastruktur khususnya bagi perekonomian.

Pembangunan infrastruktur berhubungan dengan pembangunan ekonomi suatu daerah. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai pendorong perekonomian. Pertumbuhan ekonomi dan tingkat investasi tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur. Pembangunan ekonomi yang lebih baik, sumber lapangan kerja yang stabil, dan juga termasuk lingkungan yang mendorong investasi, semuanya akan dihasilkan oleh infrastruktur (Unruh et al., 2019). Oleh karena itu, asas pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah infrastruktur. Selain dirasa mampu untuk menggerakkan perekonomian agar berkembang, infrastruktur juga mampu meningkatkan konsumsi masyarakat serta mendorong produktivitas masyarakat. Secara langsung dan tidak langsung, pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dipengaruhi oleh kedua faktor tersebut (Awandari & Indrajaya, 2016).

Karena meluasnya penggunaan infrastruktur, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakannya. Namun, dalam banyak kasus, pemerintah bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk mencapai hal ini, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005. Meskipun kemitraan dengan dunia usaha dapat memfasilitasi penerapan infrastruktur, pendekatan ini tidak selalu dapat dilakukan. Hal tersebut dikarenakan terdapat pembangunan infrastruktur yang membutuhkan modal besar dimana waktu pengembaliannya lama dan memiliki risiko investasi yang besar (Azuwandri et al., 2019). Oleh karena itu, peran pemerintah dalam menyediakan infrastruktur publik sangatlah penting. Jika tidak ada campur tangan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur, risiko penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab akan terjadi.

Ketersediaan layanan penting seperti energi, air, dan pengolahan limbah, serta transportasi, memiliki pengaruh langsung terhadap korelasi antara investasi dan ekspansi ekonomi. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, investasi pada infrastruktur sangatlah penting. (Niswati Tarman et al., 2023).

Menurut *World Bank*, infrastruktur diklasifikasikan menjadi 3 yaitu:

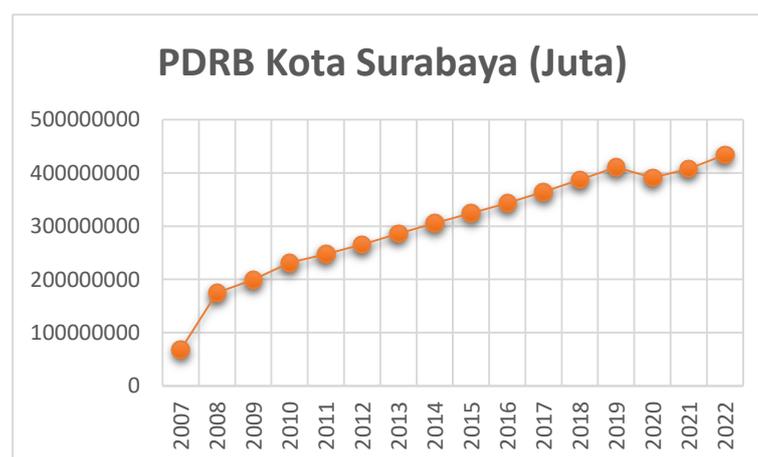
1. Infrastruktur ekonomi mencakup utilitas publik yang penting seperti listrik, telekomunikasi, air, sanitasi, dan gas. Hal ini juga mencakup pekerjaan umum seperti jalan, sistem irigasi, bendungan, sistem drainase, dan kanal. Selain itu, infrastruktur transportasi mencakup jaringan kereta api, jalan raya, bandara, pelabuhan, dan fasilitas terkait lainnya.
2. Infrastruktur sosial mencakup berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan hiburan.
3. Infrastruktur administratif mencakup kerangka hukum, pengawasan administratif, dan mekanisme koordinasi.

Ibu kota provinsi dan kota terbesar di Provinsi Jawa Timur adalah Surabaya. Terletak di pantai utara Provinsi Jawa Timur terletak kota yang menyandang nama Kota Pahlawan. Secara geografis, kota ini terletak pada lintang $7^{\circ} 9' - 7^{\circ} 21'$ LS dan bujur $112^{\circ} 36' - 122^{\circ} 54'$ BT. Di satu sisi, Surabaya berbatasan dengan Selat Madura; di sisi lain berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo di bagian selatan dan berbatasan dengan Kabupaten Gresik di bagian barat. Kota Surabaya memiliki luas wilayah 33.306,30 hektar, yang terdiri dari 80% dataran rendah dan 20% perbukitan.

Sebagai ibukota provinsi, Kota Surabaya memiliki peran yang sangat penting bagi daerah *hinterland* bahkan bagi Jawa Timur. Perkembangan dan

pertumbuhan yang terjadi di Kota Surabaya secara langsung dan tidak langsung memacu daerah sekitarnya untuk ikut berkembang (Hehamahua, 2014). Jika berbicara tentang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya menjadi penyumbang terbesar sejauh ini. Dari tahun 2018-2022, Kota Surabaya memegang peranan terbesar bagi PDRB Jawa Timur. Selain sebagai pusat pemerintahan Jawa Timur, Kota Surabaya juga bertindak sebagai pusat perekonomian di wilayah Jawa Timur. Kota Surabaya juga menjadi pintu gerbang perdagangan di wilayah Timur Indonesia. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya peranan Kota Surabaya bagi perekonomian Provinsi Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi Surabaya ditunjukkan melalui PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2007-2022 seperti pada grafik di bawah ini:

Gambar 1. 1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya Tahun 2007-2022 (Juta)



Sumber: BPS Kota Surabaya (diolah)

Gambar grafik 1.1 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya yang ditunjukkan dengan nilai PDRB dari tahun 2007 hingga tahun 2022. Berdasarkan data pada grafik, perekonomian Surabaya semakin membaik

setiap tahunnya. Dari tahun ke tahun, terjadi peningkatan yang lambat namun stabil. Perekonomian Kota Surabaya hanya mengalami keterpurukan pada tahun 2020. Wabah COVID-19 yang merebak pada tahun 2020, seperti diketahui, memperlambat pertumbuhan ekonomi dengan membatasi berbagai aktivitas. Penurunan pertumbuhan ekonomi terjadi hingga hampir -5%. Namun setelah itu, Kota Surabaya berhasil membangkitkan perekonomiannya bahkan mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi selama 16 tahun terakhir yaitu dengan total PDRB sebesar 434.268.341,12 pada tahun 2022.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya disebabkan karena banyak faktor. Kehadiran infrastruktur di Surabaya menjadi salah satu elemen pendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata akan mendorong produktivitas ekonomi masyarakat. Hal tersebut berdampak pada naiknya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kesejahteraan dan keadaan perekonomian warga Kota Surabaya secara tidak langsung akan meningkat melalui pemerataan dana pembangunan infrastruktur (Cornelius & Primandhana, 2022).

Mobilitas perekonomian sangat memerlukan adanya infrastruktur jalan sehingga infrastruktur jalan sangat penting keberadaannya. Kondisi jalan yang baik akan memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat. Namun jika kondisi jalan rusak atau bahkan rusak berat akan mengakibatkan mobilitas masyarakat terganggu. Menurut (Niswati Tarman et al., 2023), infrastruktur jalan merupakan infrastruktur yang penting untuk memperlancar mobilitas antardaerah dan perpindahan barang dan jasa.

Surabaya adalah kota besar bahkan menjadi kota terbesar kedua di Indonesia, namun masih ada beberapa infrastruktur jalan di kota ini yang rusak. Menurut sebuah tulisan pada laman *web* Tribun News (Koloway, 2023) yang menurut informasi yang dihimpun Dinas Sumber Daya Air dan Jalan Raya Kota Surabaya (DSDABM), total panjang jalan rusak ringan pada tahun 2023 mencapai 7.756 kilometer. Pada tahun 2019 hingga 2020 dan 2021, panjang jalan rusak ringan masing-masing berkurang dari 11.270 km menjadi 10.518 km dan 7.830 km. Tulisan lain yang berasal dari laman *web* Surabaya Bisnis (Widarti, 2023) menunjukkan bahwa daerah yang mengalami kerusakan jalan dan perlu perbaikan diantaranya Surabaya Barat meliputi daerah Sememi dan Benowo, Surabaya Utara meliputi Kalianak, Tambak Sarioso, Margomulyo, dan Greges yang dimana daerah tersebut merupakan kawasan pabrik dan pergudangan. Perkembangan infrastruktur jalan berdasarkan panjang jalan beraspal di Kota Surabaya tahun 2007-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 1. 2 Panjang Jalan Beraspal Kota Surabaya 2007-2022 (Km)



Sumber: BPS Kota Surabaya (diolah)

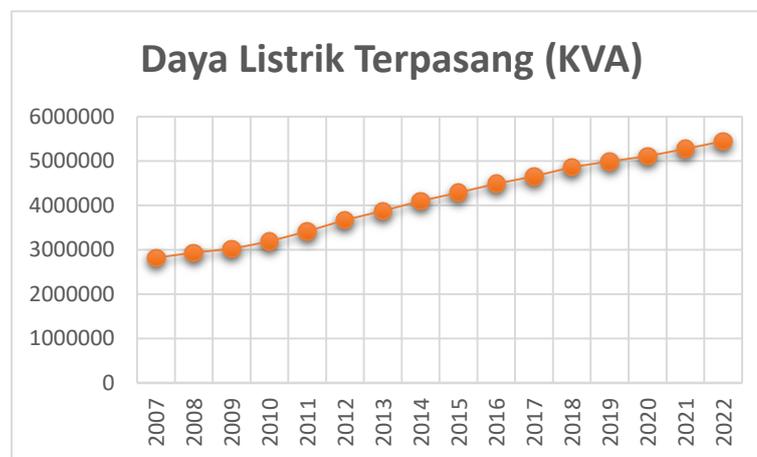
Gambar grafik 1.2 merupakan data panjang jalan beraspal di Kota Surabaya tahun 2007-2022. Grafik di atas menunjukkan pergerakan yang fluktuatif. Angka panjang jalan paling tinggi berada di tahun 2008 dengan angka 1.997,9 Km. Peningkatan pembangunan atau perbaikan infrastruktur jalan yang terlihat signifikan hanya terjadi pada tahun 2013. Sebenarnya, terjadi penurunan tajam pada tahun 2009, dan kondisi jalan yang buruk merupakan bukti nyata dari hal tersebut. Kurangnya pembangunan atau perbaikan infrastruktur jalan di Kota Surabaya dapat menghambat mobilitas perekonomian masyarakat sehingga dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya.

Infrastruktur lain yang tidak kalah pentingnya adalah listrik. Keberadaan listrik sangat diperlukan di zaman sekarang. Dari kebutuhan dalam skala kecil yaitu rumah tangga hingga kebutuhan dalam skala besar seperti industri banyak yang memakai energi listrik. Infrastruktur listrik juga menjadi tolok ukur suatu daerah dikatakan maju. Jika suatu daerah belum dialiri energi listrik maka dapat disimpulkan jika daerah tersebut termasuk daerah miskin. Seiring dengan semakin berkembangnya suatu wilayah, permintaan akan energi listrik akan semakin meningkat dan menjadi kebutuhan yang krusial. Listrik diperlukan untuk aktivitas rumah tangga dan industri (Hutauruk, 2021).

Setiap kabupaten/kota memiliki Perusahaan Listrik Negara (PLN) daerah setempat untuk mengelola energi listrik. Meskipun PLN di Kota Surabaya telah dibagi menjadi 3 area, permasalahan kelistrikan masih dijumpai. Sepanjang tahun 2017 PLN Kota Surabaya area Surabaya Selatan sempat mengalami masalah yakni adanya gangguan penyulang sehingga keberlanjutan pasokan

listrik terkendala. Gangguan terjadi sebanyak 702 kali, angka ini paling tinggi jika dibandingkan gangguan yang terjadi di 15 area lain yang termasuk dalam PLN Distribusi Jawa Timur. Gangguan ini tentunya mempengaruhi distribusi aliran listrik yang menyebabkan energi listrik tidak dapat tersalurkan (Yudha, 2020). Perkembangan infrastruktur listrik berdasarkan daya listrik terpasang di Kota Surabaya tahun 2007-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 1. 3 Daya Listrik Terpasang Kota Surabaya 2007-2022 (KVA)



Sumber: BPS Kota Surabaya (diolah)

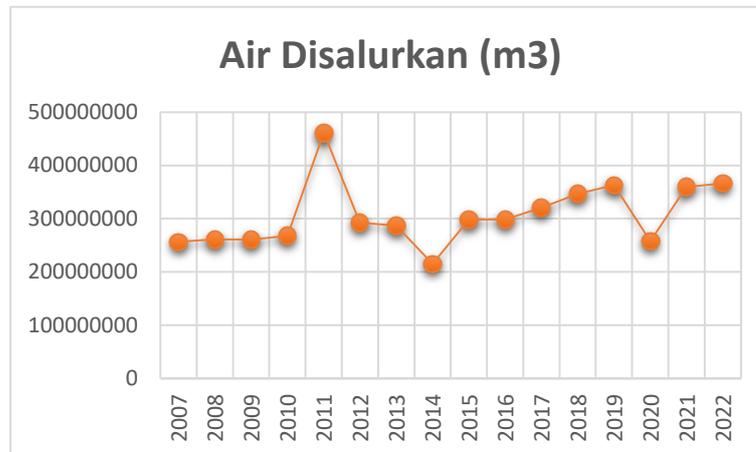
Informasi mengenai daya terpasang listrik Surabaya pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2022 ditampilkan pada gambar grafik 1.3. Dari grafik di atas diketahui terlihat bahwa infrastruktur listrik, seperti yang ditunjukkan oleh daya listrik yang terpasang, secara konsisten tumbuh dari tahun ke tahun. Meningkatnya jumlah rumah tangga yang mempunyai sambungan listrik antara tahun 2007 dan 2022 adalah buktinya. Daya listrik terpasang paling besar selama 16 tahun terakhir di Kota Surabaya adalah 5.446.528 KVA pada tahun 2022. Peningkatan yang terjadi berturut-turut ini menandakan jika PLN Kota Surabaya berfokus untuk menunjang kebutuhan primer masyarakat. Namun

peningkatan pembangunan infrastruktur listrik tidak terlalu signifikan yang dapat menyebabkan kurang optimalnya kegiatan ekonomi di Kota Surabaya.

Infrastruktur air juga menjadi infrastruktur penting bagi masyarakat. Air digunakan untuk berbagai sektor, diantaranya kebutuhan domestik, irigasi, dan industri. Ketiga sektor besar tersebut dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kebutuhan akan air bersih (Hutauruk, 2021). Meluasnya industrialisasi membutuhkan investasi untuk menjaga ketersediaan air dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari tahun ke tahun, kebutuhan akan air di Indonesia secara kontinyu mengalami peningkatan. Air bersih merupakan infrastruktur dasar yang mempengaruhi pertumbuhan output (Bulohlabnah, 2008).

Infrastruktur yang juga menjadi pendorong produktivitas perekonomian adalah air. Air PDAM di Kota Surabaya sering mengalami gangguan atau masalah. Oleh karena itu, hal ini tetap menjadi fokus pemerintah untuk segera diatasi, karena mayoritas masyarakat Kota Surabaya merupakan pelanggan PDAM. Menurut tulisan di sebuah laman *web* Jawa Pos (Ginanjari, 2022) yang mengutip data dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya, tahun 2022 ada sebanyak 7.000 pelanggan PDAM yang belum teraliri air. Hal ini disebabkan karena masalah legalitas lahan, selain itu munculnya banyak hunian baru dan bisnis properti di Surabaya juga menyebabkan masih banyak pelanggan yang belum memperoleh aliran air. Perkembangan infrastruktur air berdasarkan air yang disalurkan di Kota Surabaya tahun 2007-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 1. 4 Air Disalurkan Kota Surabaya Tahun 2007-2022 (m³)



Sumber: BPS Kota Surabaya (diolah)

Gambar grafik 1.4 menunjukkan banyak air yang disalurkan di Kota Surabaya pada tahun 2007 hingga tahun 2022. Banyak air yang disalurkan paling besar berada di tahun 2011 dengan 461.189.000 m³. Namun, secara keseluruhan grafik di atas menunjukkan perkembangan distribusi air di Kota Surabaya yang fluktuatif dan tidak stabil. Naik turunnya grafik menunjukkan pemerintah Kota Surabaya melalui PDAM Kota Surabaya belum konsisten dalam menyalurkan air kepada masyarakat. Kendala kurang meratanya distribusi air dapat menghambat kegiatan ekonomi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian Surabaya.

Menurut Teori Model Pertumbuhan Solow, hubungan antara investasi infrastruktur di bidang jalan, listrik, dan air dan pertumbuhan ekonomi dapat dikarakterisasi. Pada teori ini, Solow berasumsi jika pertumbuhan ekonomi hanya dipengaruhi oleh perubahan faktor produksi modal fisik (investasi dan tabungan) dan peningkatan populasi, sementara teknologi dianggap sebagai variabel eksogen yang menunjukkan tingkat efisiensi (Todaro & Smith, 2012).

Melalui uraian yang telah disampaikan, dapat diketahui jika infrastruktur memiliki andil dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata akan memperlancar mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya. Kelancaran kegiatan ekonomi masyarakat akan mempengaruhi perekonomian yang ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur merupakan investasi yang berdampak untuk sektor-sektor lain serta menjadi penggerak roda perekonomian suatu daerah. Disini peran infrastruktur di Kota Surabaya akan mempengaruhi produktivitas masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi setiap harinya. Menurut uraian latar belakang, dengan demikian peneliti memiliki ketertarikan mengambil penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan, Listrik, dan Air Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Surabaya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah ialah sebagai berikut:

1. Apakah Panjang Jalan Beraspal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya?
2. Apakah Daya Listrik Terpasang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya?
3. Apakah Air yang Disalurkan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ialah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Panjang Jalan Beraspal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Daya Listrik Terpasang terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Air yang Disalurkan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Menurut latar belakang permasalahan bahwa ruang lingkup penelitian harus dikategorikan secara eksplisit untuk memastikan fokus penelitian. Infrastruktur air, listrik, dan transportasi kota Surabaya akan menjadi satu-satunya fokus penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis pengaruh infrastruktur air, listrik, dan transportasi di Surabaya terhadap pertumbuhan ekonomi kota tersebut dari tahun 2007 hingga 2022 melalui lensa analisis peristiwa.

1.5 Manfaat Penelitian

Berikut manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini:

1. Bagi peneliti, Penelitian merupakan komponen penting dalam menyelesaikan program sarjana ekonomi pembangunan di Fakultas

Ekonomi dan Bisnis (S1) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jawa Timur.

2. Bagi masyarakat, Tim peneliti di balik proyek ini berharap dapat menggunakan data yang mereka kumpulkan untuk evaluasi tentang bagaimana utilitas kota termasuk jalan raya, jaringan listrik, dan sistem air bersih telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Surabaya.
3. Bagi mahasiswa, peneliti yang tertarik pada bidang ini di masa depan mungkin menganggap penelitian ini bermanfaat karena memberikan data ilmiah dan kerangka kerja untuk tinjauan di masa depan.
4. Bagi pemerintah, Dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan dan pembangunan daerah, lembaga terkait dapat menggunakan penelitian ini sebagai sumber dan faktor.